



SKRIPSI

**ANALISA PUTUSAN KPPU NOMOR 05/ KPPU- I/2012 TENTANG
PRAKTIK DISKRIMINASI DALAM TENDER *EXPORT PIPELINE
FRONT END ENGINEERING & DESIGN CONTRACT* (NO C732791)**

***ANALYSIS OF DECISION KPPU NUMBER 05 / KPPU-I/2012 ABOUT
TENDER OF PRACTICE DISCRIMINATION IN FRONT END EXPORT
PIPELINE ENGINEERING & DESIGN CONTRACT (NO C732791)***

Oleh:

RISKA ANGGRAENI

NIM. 100710101210

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**“ANALISA PUTUSAN KPPU NOMOR 05/ KPPU- I/2012 TENTANG
PRAKTIK DISKRIMINASI DALAM TENDER *EXPORT PIPELINE
FRONT END ENGINEERING & DESIGN CONTRACT* (NO C732791)”**

Oleh:

RISKA ANGGRAENI

NIM.100710101210

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Ikarini Dani Widiyati S.H., M.H.

NIP. 1973306271997022001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H.

NIM. 197105011993031001

RINGKASAN

Persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak untuk mendukung pasar dan menciptakan mobilitas dalam suatu ekosistem pasar yang sehat, namun sebaliknya disamping persaingan sangat mendukung sistem pasar, hal ini juga akan mempunyai dampak negatif apabila dilakukan dengan cara tidak sehat, praktik persaingan usaha tidak sehat secara garis besar merupakan suatu tindakan yang mempunyai akibat hukum merugikan bagi banyak pihak, baik pelaku usaha sejenis, pemerintah dan masyarakat. Tindakan diskriminasi pelaku usaha sebagaimana diputuskan oleh KPPU dalam putusan No. 5/KPPU-I/2012 merupakan praktik persaingan usaha tidak sehat yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli. Pada dasarnya kegiatan pengadaan tender sangat rentang terhadap terjadinya suatu persengkongkolan, diskriminasi maupun rasa tidak senang terhadap pelaku usaha tertentu yang didasari atas suatu alasan yang tidak logis maupun didasari atas hanya keuntungan semata yang menyebabkan pelaku usaha lain tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersaing.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 yaitu, tujuan umum tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan praktek diskriminasi dalam *Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No C732791), kemudian untuk mengetahui dan memahami mekanisme dalam tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No C732791) terhadap peraturan yang berlaku, dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang diakibatkan oleh putusan tersebut terhadap pelaku usaha dan masyarakat.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*legal researc*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) pendekatan yang beranjak dari Perundang-Undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum pendekatan konseptual (*Conceptual Aparoach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yang dicari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu perundang-undangan dengan Undang-undang yang lainnya, hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dan Studi kasus (*Case Study*) adalah merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

Garis besar pada bab pembahasan dalam skripsi ini bahwa, praktik diskriminasi merupakan praktik persaingan tidak sehat yang dilarang oleh Undang-undang No 5 Tahun 1999, segala macam perlakuan berbeda terhadap pelaku usaha tertentu dapat termasuk kedalam cakupan pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 tahun 1999, tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk dilarang atau tidak, merupakan wilayah *Rule Of Reason* untuk membuktikannya, didalam memutuskan perkara ini pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan *Rule Of Reason* yang membutuhkan pembuktian serta analisa terhadap dampak sebagaimana juga diterapkan dalam putusan No. 5/KPPU-5/2012 bahwa Chevron Indonesia Company terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d dengan alasan pembuktian yaitu adanya ketidak konsistenan Chevron Indonesia Company sebagai

penyelenggara dalam memutuskan pemenang tender yaitu dengan meloloskan PT. Worley Indonesia, dan menggagalkan PT Wood Group Indonesia, analisa ini akan membentuk rantai yang sistematis dalam pembuktiannya mulai dari analisa mengenai mekanisme pelaksanaannya dan akibat yang akan ditimbulkan atas putusan tersebut. Bahwa penulis beranggapan berbeda dengan putusan tersebut bahwa tidak ada tindakan diskriminatif sebagaimana pembuktian yang ada menurut unsur-unsur dalam pasal 19 huruf d Undang-undang No 5 tahun 1999 serta sebagaimana pula dikaji dalam pendekatan *Rule Of Reason*.

Berdasarkan uraian pada penjelasan diatas maka hal-hal yang dapat direkomendasikan ialah bahwa KPPU melalui Undang-undang No. 5 tahun 1999 KPPU untuk lebih berperan aktif dalam umeningkatkan kesadaran masyarakat, membuat putusan yang menjamin kepastian hukum serta mengubah perilaku pelaku usaha dalam rangka mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat. Sehingga dunia usaha akan terhindar dari perilaku praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga KPPU dituntut lebih meningkatkan lagi terkait kenerjanya untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diamanahkan Undang-undang No. 5 tahun 1999. Dan perlu adanya lebih banyak studi komperatif terhadap pelaksanaan tender yang memungkinkan adanya satu regulasi yang mengatur tentang mekanisme tender baik swasta maupun pemerintah. Serta masyarakat dan pelaku usaha juga harus berperilaku aktif dalam ikut serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Selain itu masyarakat dan pelaku usaha juga dapat mengawasi kinerja KPPU agar keputusan yang dikeluarkan KPPU dapat memenuhi rasa kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha sehingga akan berdampak juga pada kondisi prekonomian nasional yang kodusif.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
HALAMAN DAFTAR TABEL	v
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia	10
2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha	10
2.1.2 Asas Dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha Indonesia	12
2.1.3 Dasar-Dasar Perlindungan Persaingan Usaha	13
2.1.4 Pengaturan Hukum Persaingan Usaha	14
2.2 Persaingan Usaha Tidak Sehat	16
2.2.1 Pengertian Persaingan usaha tidak sehat	16

2.2.2 Kegiatan Yang Dilarang dalam Persaingan Usaha ..	17
2.3 Penegakan Hukum Persaingan Usaha.....	18
2.3.1 Komisi Pengawas Persaingan Usaha	18
2.3.2 Hukum Acara KPPU	20
2.3.3 Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha	21
2.3.4 Pembuktian KPPU Dalam Hukum Persaingan Usaha	23
2.4 Pelaku Usaha	23
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha	23
2.4.2 Klasifikasi Pelaku Usaha	24
2.5 Diskriminasi	25
2.5.1 Pengertian Diskriminasi	25
2.5.2 Jenis-Jenis Diskriminasi	25
2.5.3 Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 Huruf d Undang- Undang No. 5 Tahun 1999.....	26
2.6 Tender	28
2.6.1 Pengeritan Tender	28
2.6.2 Jenis-Jenis Tender	29
BAB 3. PEMBAHASAN	31
3.1 Praktik persaingan usaha tidak sehat pada pelaksanaan tender <i>Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract</i> (No C732791)	31
3.1.1 Bentuk persaingan usaha tidak sehat pada pelaksanaan tender <i>Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract</i> (No C732791) ...	36
3.1.2 Pemenuhan Unsur Praktik Diskriminasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat	57
3.1.3 Bentuk Pertimbangan Hakim Dalam Putusan KPPU NOMOR 05/ KPPU- I/2012	68

3.2 Mekanisme pelaksanaan tender <i>Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract</i> (No C732791)	70
3.3 Akibat Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaksanaan Tender <i>Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract</i> (No C732791).....	80
BAB 4. PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN